

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjadi dasar bagi perusahaan dalam memahami *corporate governance* (Aditya, 2012). Hubungan keagenan diartikan sebagai hubungan satu orang atau lebih, pemilik (*principal*) dengan manajer (*agen*) untuk melakukan jasa atas nama pemilik (*principal*) dimana *agen* diberikan kewenangan oleh pemilik (*principal*) untuk membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Thanh dan Cheung, 2010). Orang yang melakukan pekerjaan disebut sebagai manajer (*agen*) dan seseorang yang mendelegasikan tugas disebut pemilik (*Principal*).

Pemilik di perusahaan publik adalah *shareholder* dan manajer (*agen*) merupakan manajemen perusahaan. Manajer yang diberi kewenangan dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik (*principal*) sehingga lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pemilik. Oleh karena pemilik tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja manajemen sehingga pemilik memiliki ketidakpastian tentang bagaimana usaha yang dilakukan manajemen dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Situasi ini disebut dengan asimetri informasi.

Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa pemilik (*principal*) dan manajemen (*agen*) memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan konflik keagenan. Teori ini mengasumsikan bahwa tiap individu bertindak untuk kepentingan masing-masing. Prinsipal diasumsikan

hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut sedangkan agen memiliki perilaku oportunistik.

Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam *Corporate Governance*. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer. Dalam membentuk suatu pengawasan yang baik ialah dengan adanya komite-komite yang mengawasi aktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan.

Oleh karena itu, pemilik perlu merancang sistem pengendalian yang memonitor perilaku agen sehingga menghalangi tindakan yang meningkatkan kekayaan agen dengan cara mengorbankan kepentingan prinsipal. Aktivitas ini meliputi biaya penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi dan lain-lain. Aktivitas ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*.

2.2. Pengungkapan Pengendalian Internal

2.2.1. Definisi Pengungkapan

Paramitha (2012) menyatakan bahwa pengungkapan merupakan suatu alat perusahaan untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada pemakai laporan. Pemakai laporan tentunya mempunyai kepentingan pada perusahaan, sehingga perusahaan mengadakan pengungkapan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan pengungkapan secara umum adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu dalam tercapainya tujuan pelaporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan yang berbeda-beda. Selain itu, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan tersebut (Paramitha, 2012).

2.2.2. Pengertian Pengendalian Internal

Sebuah sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan atau prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya (Arens, 2008). Disamping itu COSO dalam Moeller (2009) menekankan beberapa definisi tentang pengendalian internal, diantaranya :

- 1) Pengendalian internal adalah sebuah proses yang terintegrasi dengan infrastruktur perusahaan.
- 2) Pengendalian internal tidak hanya berupa aturan, tapi dilakukan oleh orang – orang di perusahaan.
- 3) Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, tidak berupa jaminan yang pasti karena keterbatasan pada pengendalian internal.
- 4) Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional.

Moeller (2009) juga memberikan definsi pengendalian internal yang sedikit berbeda, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh manajemen yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang reliabilitas informasi keuangan dan operasional, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan aset, efisiensi operasional, pencapaian tujuan, dan nilai integritas dan etika. Pengertian tersebut memberikan gambaran yang lebih luas pada pengendalian internal, tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan akuntansi, tetapi juga menyangkut seluruh kegiatan dalam perusahaan.

2.2.3. Hal-hal yang Berkaitan dengan Pengendalian Internal

1) Manajemen

Manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya (Arens, 2008). Bahkan manajemen pada semua perusahaan publik di Indonesia, diharuskan untuk mematuhi peraturan No X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Manajemen perusahaan harus menyusun pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kegiatan memadai telah berjalan secara efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan telah tercapai (Arens, 2008).

Artinya, seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan harus melakukan pengendalian pada masing-masing tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukannya efektif dan tidak melanggar peraturan yang

berlaku. Manajemen juga perlu mengawasi pelaksanaan pengendalian internal tersebut untuk memastikan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan rencana dan orang yang menjalankan memiliki otoritas dan kualifikasi untuk melakukan pengendalian dengan efektif.

2) Unit Audit Internal

Moeller (2009) menyatakan bahwa audit internal adalah suatu fungsi (unit) formal yang ada pada perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dalam perusahaan sebagai suatu jasa untuk membantu manajemen, komite audit, dan pihak lain dalam perusahaan. Audit internal mempunyai peran yang signifikan dalam memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggungjawabnya.

Manajemen melaksanakan pengendalian internal, kemudian auditor internal secara independen menilai pengendalian internal yang dilakukan manajemen (Reding *et all*, 2009). Keberadaan unit audit internal ditegaskan oleh Bapepam dalam peraturan No.IX.I.7 lampiran keputusan ketua Bapepam No.kep-496/BL/2008 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu unit audit internal beserta piagam audit internal.

3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki komite audit, seperti yang terdapat pada peraturan No. IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Jika audit internal dibentuk dan bertanggungjawab pada dewan direksi yang tidak lain adalah manajemen perusahaan, komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris yang bertindak sebagai wakil pemegang saham perusahaan.

4) **Manajemen Resiko**

Setiap perusahaan ada untuk memberikan nilai pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), namun nilai tersebut dapat terganggu oleh kejadian yang tidak terduga yang dapat terjadi pada seluruh bagian perusahaan dan diberbagai aktivitas perusahaan. Manajemen resiko merupakan konsep yang berhubungan dengan jaminan. Perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk memberikan perlindungan dari resiko yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan manajemen resiko merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen, bukan auditor internal ataupun komite audit. Audit internal hanya menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan (Bapepam, 2008).

2.2.4. Dasar Pengungkapan Pengendalian Internal

Berdasarkan peraturan No. X.K.6 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang dikeluarkan oleh Bapepam dan L.K. Emiten atau Perusahaan publik wajib memberikan uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan perusahaan, setidaknya mengenai :

- 1) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) *Review* atas efektivitas sistem pengendalian internal.

Laporan tahunan adalah laporan komprehensif dari aktivitas perusahaan yang berlangsung dalam satu periode. Laporan tahunan dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan perusahaan dan kinerja keuangannya kepada *shareholder* dan *stakeholder* (Downes dan Barons, 1995) dalam Arifuzzaman (2011).

Shareholder dan *external stakeholder* (pihak berkepentingan diluar perusahaan) mempunyai kepentingan yang terbatas dalam pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan pengendalian yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan operasional dan finansialnya.

2.2.5. Informasi Pengendalian Internal yang Perlu Diungkapkan Perusahaan

Leng dan Li (2011) mengungkapkan delapan informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan internal, kelemahan pengendalian internal, evaluasi pihak internal, dan evaluasi pihak eksternal. Kedelapan informasi tersebut meliputi seluruh informasi yang diperlukan oleh *stakeholder* untuk mengetahui situasi pengendalian internal yang dilakukan perusahaan.

Di Indonesia standar pengungkapan informasi pengendalian internal diatur oleh Bapepam dan L.K. dalam peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang memberikan tanggung jawab pada perusahaan untuk mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengendalian internal pada laporan tahunan dibagian *corporate governance*. Komite audit, unit audit internal, sistem pengendalian internal dan manajemen resiko juga perlu diungkapkan bersama dengan pengendalian internal karena keempat komponen tersebut saling berkaitan.

2.3. Corporate Governance

Corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *shareholder*, serta pengguna yang berprinsipkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Wardani, 2010). Hal tersebut, dalam keberadaannya penting

dikarenakan oleh dua hal yaitu cepatnya perubahan yang berdampak pada persaingan global dan semakin banyak kompleksitas *stakeholder* termasuk struktur kepemilikan bisnis. Dua hal tersebut menyebabkan resiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian internal yang prima.

2.3.1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham beredar (Leng dan Ding 2011). Manajer akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memperbaiki kinerja manajemen. Kinerja manajemen yang baik tidak akan menunda pelaporan keuangan dan hal itu berarti perusahaan tersebut akan menyelesaikan laporan audit dengan segera untuk memberikan citra positif dalam perusahaan. Tingkat konsentrasi kepemilikan manajerial juga sangat mempengaruhi pada kualitas pengungkapan pengendalian internal karena *shareholder* membutuhkan keterbukaan mengenai pelaporan keuangan (Leng dan Ding, 2011).

2.3.2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Leng dan Ding, 2011). Investor institusi memiliki potensi untuk

mempengaruhi kegiatan manajemen secara langsung melalui kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut. Pihak institusi dapat menuntut penyelesaian laporan audit dengan segera karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (Ishak *et all*, 2010).

2.3.3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan manajemen, dewan direksi lainnya atau shareholder yang dapat mempengaruhi independensinya (Juniarti dan Agnes, 2009). Tujuan dibentuknya komisaris independen ialah untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan demi melindungi *shareholder* minoritas dan pihak-pihak lainnya.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Zhou dan Chen, 2010).

2.3.4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah

seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit (Leng dan Ding, 2011).

Salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas auditor internal, serta melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi (Zhou dan Chen, 2010).

2.4. Kualitas Laba

Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor, pemerintah, pemegang saham dalam bentuk bunga, saham, dan dividen (Kuntariati, 2013). Kualitas laba menjadi bagian terpenting dari laporan keuangan, karena kualitas laba dapat menggambarkan kualitas laporan keuangannya.

Kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang besar bagi pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, misalnya *shareholder*. Mereka menanamkan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, demikian juga sebaliknya. Laba semakin dekat dengan aliran kas operasi mengidentifikasi laba yang semakin berkualitas (Kuntariati, 2013).

Salah satu cara menentukan kualitas laba menurut (Givoly, 2010) adalah dengan ketiadaan manajemen laba. Manajemen laba telah umum digunakan sebagai proksi dari kualitas laba (Morais dan Curto, 2008) dalam Thanh dan

Cheung (2010). Manajemen laba hanya akan lebih menguntungkan pihak manajemen dibandingkan pemegang saham (Thanh dan Cheung, 2010). Manajemen laba dapat diproksi dengan *discretionary accrual* dengan mengestimasi akrual dari aset, pendapatan, dan aset tetap (Givoly, 2010) dalam (Thanh dan Cheung, 2010).

2.5. Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji pengaruh *corporate governance* dan kualitas laba terhadap pengungkapan pengendalian internal. Penelitian ini telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Berikut ringkasan dari para peneliti sebelumnya :

Tabel 2.1
Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu

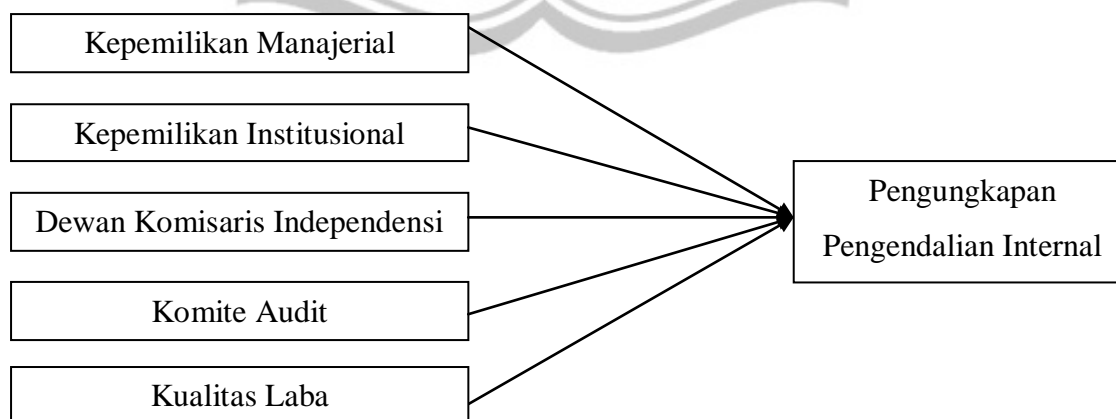
Peneliti	Sampel	Kajian Pustaka
Leng dan Li (2010)	Meneliti 1.273 perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek <i>Shenzhen Stock Exchange</i> tahun 2010.	Terdapat hubungan positif (+) antara kualitas laba dengan pengungkapan pengendalian internal
Thanh dan Cheung (2010)	Meneliti 152 perusahaan yang terdaftar di NASDAQ OMX tahun 2010.	Menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat (-) antara kualitas laba dengan pengungkapan pengendalian internal.
Zhou dan Chen (2010)	Meneliti 1.557 perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek <i>Shanghai Stock Exchange</i> dan SZSE tahun 2008.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hubungan positif (+) antara dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas pengungkapan pengendalian internal. • Kepemilikan institusional

		memiliki pengaruh negatif (-) terhadap pengungkapan pengendalian internal.
Leng dan Ding (2011)	Meneliti 1.309 perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam <i>Shanghai Stock Exchange</i> dan SZSE tahun 2010.	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif (-) terhadap pengungkapan pengendalian internal.

2.6. Kerangka Pemikiran

Teori agensi telah memberikan penjelasan tentang hubungan antara *agen* (manajemen) dan pemilik (*shareholder*). Manajemen perusahaan sebagai *agen* mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh *shareholder* sebagai pemilik (*principal*). Untuk itu penelitian ini akan membahas tentang pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Laba terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Kerangka berfikir dalam bentuk gambar dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Leng dan Ding (2011) pada perusahaan yang terdaftar di *Shenzhen Stock Exchange* menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Pemegang saham dapat memberikan informasi penting tetapi terkadang tidak menguntungkan dengan menggunakan posisi pengendali manajemen untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Dari uraian di atas maka hipotesis pertama yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

2.7.2. Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Leng dan Ding (2011) melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di *Shenzhen Stock Exchange* menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kualitas pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Tingginya proporsi kepemilikan institusional sulit untuk menahan manajemen dan membawa

rendahnya kualitas pengungkapan pengendalian internal (Zhou dan Chen, 2010).

Dari uraian di atas maka hipotesis kedua yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

2.7.3. Dewan Komisaris Independensi terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2010) pada perusahaan publik yang terdaftar di *Shenzhen Stock Exchange* menghasilkan kesimpulan bahwa Dewan Komisaris Independensi berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian Internal. Dari uraian di atas maka hipotesis ketiga yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Dewan Komisaris Independensi berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal

2.7.4. Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2010) pada perusahaan publik yang terdaftar di *Shenzhen Stock Exchange* menghasilkan kesimpulan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Ho dan Wong (2001)

memberikan bukti mendukung bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Shaoqing (2008) meneliti pengaruh komite audit pada pengungkapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan pengendalian internal.

Dari uraian di atas maka hipotesis keempat yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

2.7.5. Kualitas Laba terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal

Penelitian yang dilakukan oleh Leng dan Li (2011) pada perusahaan publik yang terdaftar di *Shenzhen Stock Exchange* menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas laba dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. Mentari (2013) meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas laba terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Pengungkapan pengendalian internal menjadi informasi yang perlu dikemukakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan telah menerapkan pengendalian internal yang efektif sehingga mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Dari uraian di atas maka hipotesis kelima yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5 : Kualitas laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi pengendalian internal.

